

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN *JOB RELEVANT INFORMATION (JRI)* TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

Benni M Siahaan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2016

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PARTICIPATION BUDGET AND JOB INFORMATION RELEVANT TO THE INFORMATION ASYMMETRIC

(Studies in Regional Work Units (SKPD) in the Environment Government of Bandar Lampung)

By:

BENNI M SIAHAAN

Development of a world organization, an organization requires appropriate strategies and policies as well as processing carefully. One of the tools that can be used by management in the management of the organization is the budget. The budget will be an invaluable tool in the management control system to allocate limited natural resources and financial resources within a certain period to achieve the objectives of the organization. In the case of public sector budgeting a good governance of the central, provincial, and district / city adapted to the existing regulations.

The purpose of this study was to test the level of significance of the effect of budget participation on asymmetric information, and also to test the level of significance of the effect of job relevant information on asymmetric information in the SKPD in Bandar Lampung. Objects in this study are all departments within the working unit (SKPD) in Bandar Lampung city government environment.

The results of this study concluded the hypothesis that the negative effect on the budgetary participation of asymmetric information supported by the research results. While job relevant information negatively affect the asymmetric information is not supported by the research result.

The advice given in this study are for further research can expand the sample so as to provide an overview and a better results, further research is also expected to always accompany the respondents in terms of filling out the questionnaire so that the data generated in accordance with the intent of each item existing questions and is expected to add to other factors that have not been used in this study so that the level of influence will be greater and also items each question in the questionnaire in order to be reproduced.

Keywords: Participation Budget, Job Relevant Information, Information Asymmetries

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN *JOB RELEVANT INFORMATION (JRI)* TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Oleh:

BENNI M SIAHAAN

Berkembangnya suatu dunia organisasi maka suatu organisasi membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat serta pengolahan secara cermat. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengelolaan organisasi adalah anggaran. Anggaran akan menjadi alat bantu dalam sistem pengendalian manajemen untuk dapat mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya dana dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam hal penyusunan anggaran sektor publik suatu pemerintahan baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh partisipasi anggaran terhadap informasi asimetris dan juga untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh *job relevant information* terhadap informasi asimetris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bandar Lampung. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap informasi asimetris didukung oleh hasil penelitian. Sedangkan *job relevant information* berpengaruh negatif terhadap informasi asimetris tidak didukung oleh hasil penelitian.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga dapat memberikan gambaran dan hasil yang lebih baik, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat selalu mendampingi responden dalam hal pengisian kuesioner sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan maksud dari setiap item pertanyaan yang ada dan diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga tingkat pengaruhnya akan lebih besar dan juga item setiap pertanyaan dalam kuesioner agar lebih diperbanyak.

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran, *Job Relevant Information*, Informasi Asimetris

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN *JOB RELEVANT INFORMATION (JRI)* TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Oleh

Benni M Siahaan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG

2016

Judul Skripsi : **PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN *DAN* JOB RELEVANT INFORMATION (JRI) TERHADAP INFORMASI ASIMETRIS (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Benni M Siahaan**

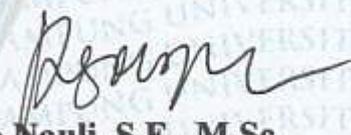
No. Pokok Mahasiswa : 1111031023

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001


Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP 19820623 200812 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

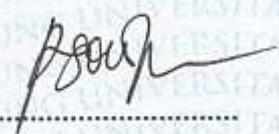
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

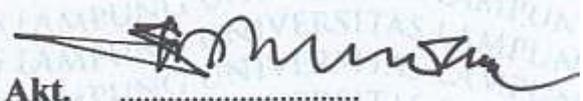


Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**



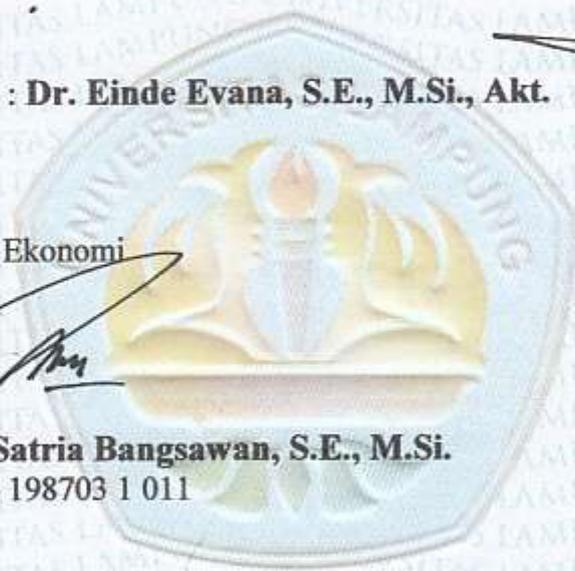
Penguji Utama : **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Oktober 2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Benni M Siahaan

NPM : 1111031023

Jurusan : Akuntansi

Judul skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information* (JRI) Terhadap Informasi Asimetris (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil penelitian / skripsi serta sumber informasi atau data adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.
2. Menyerahkan sepenuhnya hasil penelitian saya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* untuk publikasi ke media cetak maupun elektronik pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Tidak akan menuntut/meminta ganti rugi dalam bentuk apapun atas sesuatu yang dilakukan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terhadap hasil penelitian saya ini.
4. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini dinyatakan plagiat/penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Benni M Siahaan

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Bandung pada tanggal 9 Januari 1992, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Riduan Siahaan dan Ibu Tiraya Pane.

Peneliti mengenyam pendidikan pertama kali yaitu pendidikan sekolah dasar di SDN 02 Balige Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang selesai pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Bhudi Dharma, Balige Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 02 Balige Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 juga peneliti diterima sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Undangan. Selama masa perkuliahan, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) Unila dan di Himpunan Kegiatan Akuntansi (HIMAKTA).

MOTO

“Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur”

(Kolose 2:7)

“Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.”

(Filipi 1:22a)

” Try not to become a man of success, rather than becoming a man of value”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus Kristus,
kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang kusayangi.

Bapak dan Alm.Mama ku tercinta, motivator terbaik dalam
hidupku yang tak pernah lelah mendoakan, menyayangiku, atas
semua pengorbanan dan kesabaran sehingga aku bisa sampai pada
titik ini.

Adik-adikku Diana Siahaan, Mateus Siahaan dan Natalia Siahaan
yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat yang tiada
henti-hentinya.

Seluruh keluarga besar dan saudaraku yang selalu memberikan
nasihat serta semangat tanpa mengenal lelah sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat, berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information* (JRI) Terhadap Informasi Asimetris (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung)”. terselesaikan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E, M.Sc, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan pengarahan kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Einde Evana S.E., M. Si., Akt., selaku penguji utama pada ujian skripsi yang bersedia hadir dan memberikan kritik, saran serta pembekalan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Komaruddin, S.E., M.E., Akt., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam belajar mulai dari awal masuk kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh dosen jurusan Akuntansi, dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan membagikan pengalamannya sehingga mendukung teori yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu kelancaran pada proses penyusunan skripsi.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Riduan Siahaan dan Ibu Alm. Tiraya Pane tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan yang tiada henti dan tak pernah lelah memberi sarana dan prasarana untuk kuliah, memberi semangat, motivasi serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga untuk Adik-adikku Diana Siahaan, Mateus Siahaan dan Natalia Siahaan.
11. Keluarga besar yang ada di Lampung, Tulang dan Nantulang Eva, Kakak dan Abang Tian, Jekson Silaen dan Julpen Sitanggang. Terimakasih atas dukungan dalam penyelesaian perkuliahan yang telah menjaga dan merawat saya selama kuliah di UNILA.

12. Partner terbaik selama perkuliahan Elsa Yunita Batubara yang selalu setia mendampingi dalam susah maupun senang.
13. Teman-teman PKMK: Dwi Sutrisno, Robert Daud, Ririn, Lastiur, Loren, Ocha, Redes, Dona Vitasari, Hara, Yuli, Natalina, Hanny, Jonathan, Riana, Julian, Retno, Ernesto, Bobby, Paulus, Rahel, Desi, Artika, Rony, Doby, Pio, Ribka, Surya, Andy, Haroida, Christabella, Glorius, Melissa, Sio, Sergio, Rosalika, dll. Terimakasih untuk kasih setianya selama ini bersekutu bersama.
14. Sahabat-sahabat terbaikku di Akuntansi 2011: Binal Arif, Yuni Apriani (Nyonya Binal), S. Nicho Jayakusuma, Panggih Pradila Murdiono, Ahmad Abdallah Alhudaifi, Yuni Fidasari, Firman Adha, Agung prasastie, Gilang Andriyan, Moushafi Bellavito, Muhammad Adriansyah, Andika Wicaksono dan Frans Budi Prasetyo, yang telah membantu, mendukung, dan memberikan inspirasi dan canda tawa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita.
15. Sahabat-sahabat Akuntansi 2011: Alif, Bily, Jaka, Andueri, Viona, Fatma, Rindy, Dara, Santi Tanoto, Vety, Kevin, Vianna, Esther, Grace, Nabila, Mutia, Cinta, Lisna, Arum, Sherly, Nisa, Putri (PS), Okti, Dinda, Mpit, Sinta, Trisa, Yezy, Gustia, Siti, Resti, Diyah, Fajar, Dion, Daniel, Deni, Restu (enyeng), Tito, Rachmad, Marce, Feni, Rara, Sam, Santi, Lian, Juna, Arridza, Rido, Boga, Ayu, Yoga, Yogi, Veriza, Wawan, Imam, dan teman-teman yang lainnya. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
16. Saudara-saudara saya terkasih selama di Unila, Johannes Kharisma Siahaan, Tiara Lentika Simanjuntak, Yusan Simanjuntak, Debora Ibotona

dan juga Dian. Terimakasih telah memberikan warna selama menjalani perkuliahan.

17. Rekan-rekan kosan, Ranto Tumanggor, Antonius Situmorang, Nofrid, Natanael, Bona, Pido, Viktor, Kosim, Josua, Rika, Ius, Alfian, bang Ephan, Rio, Bang Ian, Nopen, Dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Teman- teman selama berorganisasi di UKMK dan juga teman-teman selama KKN di desa Sendang Agung.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saat ini penulis hanya bisa membalas dengan ucapan terima kasih.

Penulis sadar dan sangat paham bahwa skripsi ini terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bantuan serta motivasi pihak-pihak tersebut. Semoga Allah memberikan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan serta memperhitungkannya sebagai amal baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2016

Penulis,

Benni M Siahaan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Konsep Anggaran	8
2.1.2 Informasi Asimetris	12
2.1.3 Partisipasi Anggaran	14
2.1.4 <i>Job Relavant Asimetris</i> (JRI)	16
2.1.5 Proses Penganggaran di Pemerintah Daerah	18
2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	26

2.4 Hipotesis.....	26
2.4.1 Partisipasi Anggaran dan Pengaruhnya Terhadap Informasi Asimetri	26
2.4.2 Job Relevant Information dan Pengaruhnya Terhadap Informasi Asimetris.....	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Hipotesis.....	29
3.2 Data Penelitian	29
3.3 Variabel Operasional.....	30
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.5 Pengujian Validitas dan Realibilitas	33
3.6 Pengujian Hipotesis.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1 Data dan Sampel	35
4.1.2 Karakteristik Responden	36
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif	38
4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	40
4.1.4.1 Uji Validitas	40
4.1.4.2 Uji Reliabilitas	41
4.2. Pengujian Hipotesis	42
4.2.1 Menguji Koefisien Determinasi (R^2)	42
4.2.2 Hasil Uji Hipotesis	42
4.3. Pembahasan	44

4.3.1 Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Anggaran (X1) Terhadap Informasi Asimetris (Y)	44
4.3.2 Hasil Uji Pengaruh Job Relevant Information (X2) Terhadap Informasi Asimetris (Y)	45
V. KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Keterbatasan Penelitian	48
5.3 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
2.1 Review Penelitian Terdahulu	24
3.1: Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Informasi Asimetris.....	32
4.1 Penyebaran Kuesioner Penelitian	35
4.2 Jenis Kelamin Responden	36
4.3 Pendidikan Terakhir Responden	37
4.4 Lama Bekerja Responden	38
4.5 Uji Statistik Deskriptif	39
4.6 Hasil Uji Validitas.....	40
4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	41
4.8 Koefisien Determinasi (R^2).....	42
4.9 Hasil Pengujian Individu (Uji t).....	43

DAFTAR LAMPIRAN**Lampiran**

- 1 Daftar SKPD Yang Menjadi Responden Penelitian
- 2 Daftar SKPD Yang Menolak Untuk Diteliti
- 3 Kuisisioner Penelitian
- 4 Data Hasil Kuisisioner Responden
- 5 Hasil Uji Validitas
- 6 Hasil Uji Realibilitas
- 7 Uji Statistik Deskriptif
- 8 Uji Koefisien Determinasi
- 9 Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya dunia organisasi dan juga persaingan antar organisasi yang semakin ketat maka suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan suatu strategi dan kebijakan yang tepat serta pengolahan secara cermat. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan adalah anggaran. Anggaran akan menjadi alat bantu dalam sistem pengendalian manajemen untuk dapat mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya dana dalam periode tertentu untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam hal penyusunan anggaran sektor publik suatu pemerintahan baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemeritah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat untuk dapat memajukan dan mengembangkan daerah sangat

diperlukan. Sehingga wujud dari penyelenggaraan suatu otonomi daerah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, adil dan merata.

Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2001 dalam Mangasi Sinurat, 2009). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009). Dapat dikatakan suatu anggaran sektor publik adalah suatu acuan untuk dapat mengelola dan merancang program dengan menggunakan uang publik.

Kegiatan penganggaran terbagi dua, yaitu penganggaran *top-down* dan penganggaran *bottom-up*. Sebelumnya penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down* dimana proses penyusunan anggaran itu berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para bawahannya agar dapat menjalankan suatu program dengan uang tersebut sehingga bawahan cenderung hanya melakukan apa yang telah disusun. Dengan penerapan sistem ini kinerja bawahan menjadi tidak efektif diakibatkan target yang diberikan terlalu menuntut dengan sumber daya yang terbatas. Dalam proyeksi atasan kurang mengetahui potensi dan hambatan apa yang dimiliki oleh bawahan dengan memberikan suatu target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan.

Penyusunan anggaran yang baik sebaiknya menggunakan prinsip dari bawah ke atas (*bottom-up*) dimana proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun, dengan kata lain melibatkan berbagai level jabatan di setiap departemen dalam penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian diharapkan akan terdapat berbagai masukan dari kalangan bawahan untuk menentukan target kinerja yang hendak ingin dicapai dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu.

Keterlibatan para pimpinan suatu organisasi terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebuah partisipasi untuk menentukan tujuan organisasi tersebut, ketika diaplikasikan dalam perencanaan, partisipasi berarti melibatkan pimpinan tingkat bawah dan menengah untuk menyusun langkah, serta membuat keputusan mengenai tujuan operasi organisasi (Husin, 2012). Oleh karena itu bisa disimpulkan, keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dapat menambah ilmu mereka mengenai suatu anggaran dan juga memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah.

Bertolak dari kondisi di atas, organisasi sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang disebut anggaran partisipasi (*participatory budgeting*).

Melalui sistem ini, bawahan dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut bagiannya untuk mengusahakan tercapainya kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai anggaran.

Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Murray, 1990 dalam Sumarno, 2005). Dalam proses penyusunan anggaran tersebut akan berdampak langsung terhadap perilaku manusia baik yang bersifat perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Perilaku yang positif timbul jika tujuan pribadi masing-masing manajer selaras, serasi dan seimbang dengan tujuan perusahaan (*goal congruence*) dan manajer mempunyai kemauan untuk memenuhinya. Sebaliknya, tindakan negatif seperti *budgetary slack* (Warindrani, 2006). Dikatakan sebagai *budgetary slack* apabila dalam proses pembuatan anggaran dilakukan dengan meninggikan biaya atau mengurangi pendapatan dari yang seharusnya.

Bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat mendorong bawahan/pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran. Hal ini mempunyai implikasi *negative* seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap unit pertanggungjawaban mereka (Webb, 2002 dalam Krisler, 2006). Hal ini sejalan dengan Utomo (2006) dimana informasi asimetris mendorong bawahan/pelaksanaan anggaran membuat senjangan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi asimetris merupakan pemicu (*antecedent*) senjangan anggaran. Peneliti terinspirasi untuk meneliti hubungan antara partisipasi anggaran dan informasi asimetris sehingga keberadaan senjangan anggaran dapat dideteksi lebih awal.

Job Relevant Information diidentifikasi sebagai salah satu informasi yang membantu manajer untuk memperbaiki pemilihan tindakan melalui upaya yang

diinformasikan dengan baik, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan, selain informasi yang mempengaruhi keputusan (Kren, 1992 dalam Hafridebri, 2013). Informasi *job relevant* membantu memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi manajer mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Mulyasari (2005) menyatakan bahwa apabila bawahan/pelaksana anggaran ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang mereka miliki. Atasan/pemegang kuasa anggaran menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan/pelaksana anggaran sehingga semakin mengurangi informasi asimetris dalam hubungan atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran.

Bila bawahan/pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga atasan/pemegang kuasa anggaran akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Yusfaningrum, 2005). Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut meningkat. Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya informasi asimetris.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information Terhadap Informasi Asimetris***”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap informasi asimetris?
2. Apakah *job relevant information* memiliki pengaruh terhadap informasi asimetris?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh partisipasi anggaran terhadap informasi asimetris pada satuan kerja perangkat daerah di Bandar Lampung.
2. Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh *job relevant information* (JRI) terhadap informasi asimetris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bandar Lampung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi keprilakuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* terhadap informasi asimetris.
2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.
3. Menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bandar Lampung yang diharapkan dapat berguna dalam rangka penyusunan anggaran dan pengambilan kebijakan nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Konsep Anggaran

Menurut Anthony dan Govindajaran (2002), anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi. Sebuah anggaran operasi biasanya dalam satu tahun dan menyatakan rencana pendapatan biaya untuk tahun yang bersangkutan. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan.
2. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
3. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
4. Dinyatakan dalam istilah moneter, walupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter (contoh: unit yang terjual atau diproduksi).
5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran.
6. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan.

Dalam penyusunan suatu anggaran perlu diperhatikan beberapa syarat yakni bahwa anggaran tersebut harus realistis, luwes dan berkelanjutan. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan berkelanjutan merupakan suatu usaha yang insidental.

Anggaran daerah berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter pada suatu instansi. Ini merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mardiasmo (2002) mengungkapkan manfaat anggaran dalam organisasi pemerintah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencana
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat penilai kerja
4. Anggaran sebagai alat motivasi
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
7. Anggaran sebagai alat politik
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran sebagai alat perencanaan artinya anggaran yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran tersebut digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan, berapa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada.

Anggaran sebagai alat pengendali memiliki arti bahwa anggaran memberikan sebuah gambaran lengkap mengenai semua rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar segala kegiatan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dengan anggaran, pemerintah dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan yang mungkin terjadi.

Anggaran sebagai penilai kinerja. Hal ini berarti dalam konteks hubungan antara pihak eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (DPRD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 mengenai penyampaian pelaporan LKPJ bahwa Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dalam hal ini diwakili oleh kepala daerah kepada DPRD. Salah satu penjelasan yang ada dalam laporan itu adalah penjelasan pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah di dalamnya. Laporan tersebut akan menjelaskan kinerja eksekutif pada satu tahun anggaran.

Anggaran sebagai alat motivasi. Artinya dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, manajer dan staffnya agar berusaha bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. sehingga dalam penyusunan target anggaran senantiasa jangan

terlalu tinggi sehingga akan sulit untuk dicapai dan juga jangan terlalu rendah karena akan terlalu mudah untuk dipenuhi.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Artinya saat ini setiap unit kerja terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintahan. Setiap bagian dapat berkoordinasi dengan bagian lain sebab anggaran berisi tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap unit pemerintahan. Selain itu juga, anggaran harus dikomunikasikan keseluruh unit kerja untuk dilaksanakan.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Melalui anggaran, publik dapat mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga publik dapat melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik, artinya anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan uang terhadap prioritas tersebut. Anggaran pemerintah merupakan dokumen politik sebagai bentuk dari komitmen eksekutif dan kesepakatan dengan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian berorganisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disepakati dapat menjatuhkan kepemimpinan atau paling tidak dapat menurunkan kredibilitas pihak eksekutif.

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, dan lain-lain.

2.1.2 Informasi Asimetris

Atasan atau pemegang kuasa anggaran mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih daripada bawahan atau pelaksana anggaran mengenai unit tanggung jawab bawahan atau pelaksana anggaran, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan/pemegang kuasa anggaran kepada bawahan atau pelaksana anggaran mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan atau pelaksana anggaran terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan atau pelaksana anggaran akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut informasi asimetris.

Pembahasan lebih dalam diarahkan pada informasi asimetris kedua, karena sebenarnya tingkat kemampuan masing-masing unit yang sebenarnya sangat jelas diketahui oleh bawahan atau pelaksana anggaran, sementara pengetahuan atasan/pemegang kuasa anggaran tentang kemampuan tiap unit hanya bergantung pada laporan yang dibuat oleh bawahan (Utomo, 2006 dalam Handayani, 2013). Dalam anggaran konvensional dimana penyusunannya dilakukan secara *top-down* kondisi diatas dapat terjadi karena tidak ada ruang dimana atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan atau pelaksana anggaran dapat berkomunikasi dan saling bertukar pengetahuan mengenai apa yang terjadi dalam unit tanggung jawab bawahan atau pelaksana anggaran. Partisipasi anggaran memberikan kesempatan itu, sehingga secara logis dapat diduga bahwa peningkatan partisipasi akan mengurangi informasi asimetris.

Fitri (2004) mendefinisikan informasi asimetris sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasannya, termasuk informasi lokal maupun informasi pribadi. Fitri (2004) juga mengemukakan dengan adanya partisipasi anggaran dari manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran, mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua hal. Pertama, proses partisipasi mengurangi informasi asimetris dalam organisasi, dengan demikian memungkinkan manajemen tingkat atas mendapatkan informasi mengenai masalah lingkungan dan teknologi, dari manajer tingkat bawah yang mempunyai pengetahuan khusus. Kedua, proses partisipasi dapat menghasilkan komitmen yang

lebih besar dari manajemen tingkat bawah untuk melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran.

Kegiatan organisasi yang berbeda-beda mengharuskan arus informasi berjalan dengan lancar. Jika informasi yang dimiliki oleh salah satu anggota tidak disampaikan kepada yang lain padahal hal tersebut untuk membantu kepentingan organisasi, maka sudah tentu akan dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. Seperti diungkapkan oleh Penno (1984) dalam Utomo (2005), jika pemilik perusahaan tidak mengetahui informasi yang seharusnya diketahui maka bisa saja pemilik perusahaan akan salah mengambil keputusan dan menyebabkan perusahaan akan merugi. Informasi asimetris dapat menyebabkan masalah pengendalian jika anggota organisasi menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan sendiri dan bertentangan dengan kepentingan organisasi. Para pemimpin organisasi dapat mengatasi masalah pengendalian ini dengan mengurangi adanya informasi asimetris.

2.1.3 Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran yaitu sebagai tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan (Brownell, 1982 dalam Sumarno, 2005). Dengan penerapan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dapat mengetahui seberapa jauh individu dapat terlibat dan memberikan pengaruh dalam anggaran.

Partisipasi anggaran ini memungkinkan para manajer untuk melakukan negosiasi dengan atasan mereka mengenai kemungkinan target anggaran yang dapat dicapai (Brownell dan McInnes, 1986). Partisipasi anggaran memiliki beberapa manfaat. Menurut Siegel dan Marconi (1989), manfaat partisipasi anggaran yaitu :

1. Memacu peningkatan moral dan inisiatif untuk mengembangkan ide dan informasi pada seluruh tingkat manajemen.
2. Meningkatkan *group cohesiveness* yang kemudian meningkatkan kerjasama antar individu dalam pencapaian tujuan.
3. Terbentuknya *group internalization* yaitu penyatuan tujuan individu dan organisasi.
4. Menghindari tekanan dan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Manajer menjadi tanggap pada masalah-masalah sub unit tertentu serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan antar departemen.

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengusulan anggaran pemerintah daerah adalah para manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah (kepala bidang, kepala sub dinas, kepala bagian, kepala sub bagian, Kepala seksi dan kepala sub seksi) pada pemerintah daerah. Dengan dilibatkannya manajer dalam penyusunan anggaran, akan menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang sedang dan yang akan dihadapi serta membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anggaran Darlis (2002).

2.1.4 Job Relevant Information (JRI)

JRI adalah suatu informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas (Kren, 1992 dalam Handayani, 2013). Krisler (2006) menambahkan bahwa JRI membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

JRI dapat meningkatkan kinerja karena memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pemilihan serangkaian tindakan yang lebih efektif. JRI yaitu informasi untuk mengambil tindakan agar tercapai hasil lebih baik. Bawahan sebenarnya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan atasan. Informasi yang dimiliki bawahan yang berhubungan dengan tugas, akan membuat bawahan lebih keras dalam berusaha dan jauh lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas dibandingkan dengan atasan yang tidak memiliki informasi yang berhubungan dengan tugas.

Dengan adanya partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran, maka bawahan dapat memberikan atau memasukan informasi lokal yang dimilikinya. Dengan cara ini bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin saja dapat dimasukkan dalam anggaran sebagai dasar penilaian. Dalam hal ini JRI dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai alternatif-alternatif keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bagi pembuat keputusan. Peran partisipasi dalam kondisi

lingkungan tinggi menjadi penting karena dengan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan dihasilkan JRI (Kren, 1992 dalam Vebyana, 2003). JRI juga dapat meningkatkan kinerja, karena memungkinkan perkiraan lebih akurat atas alternative tindakan yang diambil saat kondisi lingkungan berubah. Kren, (1992) dalam Vebyana, (2003) juga mengidentifikasi dua tipe utama dari informasi perilaku manajer dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja dan JRI yaitu informasi untuk mengambil tindakan agar tercapai.

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Krisler, 2006). Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut meningkat. Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya asimetri informasi.

JRI diukur dengan menggunakan teori yang dikembangkan Kren (1992) dalam Vebyana (2003):

- A. Mendapat informasi yang jelas
- B. Mempunyai informasi yang memadai
- C. Memperoleh informasi yang strategi
- D. Mencari informasi yang tepat

2.1.5 Proses Penganggaran di Pemerintah Daerah

Penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah setiap tahun memberikan gambaran dari segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam satu periode.

Dimana sebelum disetujui bersama guna mencapai suatu nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, anggaran tersebut dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mardiasmo (2002) proses siklus anggaran daerah terdiri dari empat tahap, yaitu: Perencanaan, ratifikasi, implementasi, dan evaluasi.

Tahap perencanaan adalah hasil evaluasi dari kegiatan-kegiatan dimasa lalu dan analisis dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang untuk pengembangan prioritas daerah. Agar prioritas anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada maka diperlukan seluruh partisipasi yang aktif dari seluruh *stakeholder*. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dibahas bersama anggota DPRD untuk disetujui dan ditetapkan oleh eksekutif yang lebih tinggi sebagai APBD tahun berjalan. Pada proses pembahasan pihak-pihak eksekutif yang terlibat harus mendefinisikan program dan kegiatannya secara terperinci.

Setelah disahkan rancangan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maka kegiatan-kegiatan itu harus segera diimplementasikan. Prosedur dalam implementasi harus memadai, artinya sumber penerimaan yang sah dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, mungkin saja terdapat hal yang mendesak mengenai posisi anggaran yang ada maka eksekutif diizinkan untuk merevisi anggaran

daerahnya. Selama tahun anggaran harus ada proses *monitoring* atau pengawasan di semua tahap yang berguna sebagai pengendalian bagi pelaksana anggaran.

Pada tahap proses penyusunan di pemerintah daerah, terdapat lima pendekatan yang umumnya digunakan (Bastian, 2006). Pendekatan politik (*political approach*), pendekatan teknokratik (*technocratic approach*), pendekatan bawah-atas (*bottom-up approach*), pendekatan atas-bawah (*top-down approach*), pendekatan partisipasi (*participatory approach*).

Pendekatan politik, misi dan program kepala daerah terpilih menjadi visi dan misi jangka menengah daerah, sementara program kepala daerah terpilih menjadi kebijakan utama dan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka panjang, dimana hal ini bukan hanya menjadi kepentingan seluruh pemangku kepentingan daerah masa kini namun juga pengantar generasi selanjutnya, maka visi, misi daerah pembangunan jangka panjang daerah semestinya menjadi prakarsa dan konsensus seluruh komponen daerah.

Pendekatan teknokratik, perencanaan dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli atau lembaga yang resmi dan diakui kapasitasnya, serta memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan dengan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam dokumen rencana, indikator pencapaian kinerja disampaikan secara eksplisit atas rencana yang disusun. Dengan demikian, rencana tersebut memperlihatkan efektivitas pelaksanaan rencana, dapat diukur pencapaiannya, serta mudah untuk diintegrasikan dengan kegiatan penganggaran.

Pendekatan bawah-atas, merupakan perencanaan yang dibangun atas tingkatan pemerintah yang lebih rendah untuk disampaikan pada pembahasan perencanaan ditingkatkan yang lebih tinggi. Rencana hasil proses bawah-atas ini diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Pendekatan atas-bawah, adalah pendekatan yang diawali dengan perencanaan dengan penyampaian rencana atau program dari pemerintah yang ditingkatkan lebih tinggi untuk dioperasionalkan pada pemerintah daerah atau pada wilayah administratif yang lebih kecil. Rencana hasil pendekatan atas-bawah ini diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Pendekatan partisipasi merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan yang sedang direncanakan tersebut. Pemangku kepentingan dilibatkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terait dengan rencana yang bersangkutan. Kepentingan para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil

rencana dengan kapasitas dan kepedulian atas rencana yang sedang disusun. Hasil dan tindak lanjut atas kesepakatan partisipasi tersebut dipertanggungjawabkan oleh para pengambil keputusan.

2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan

Undang-Undang No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara

1. Pemerintah Daerah melalui Panitia Anggaran Eksekutif menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) yang selain diikuti oleh unsur pemerintah juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemuka Adat, Pemuka Agama, dan kalangan dunia usaha.
3. Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembahasan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
4. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah melalui Panitia Anggaran Eksekutif bersama dengan Panitia Anggaran Legislatif membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

5. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
6. RKA SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan terdahulu.
7. Hasil Pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan PERDA tentang APBD tahun berikutnya.
8. Pemerintah Daerah mengajukan rancangan PERDA tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
9. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan PERDA tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Yusfaningrum, (2005) menemukan hubungan antara partisipasi dengan JRI dimana dalam proses partisipasi, bawahan diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas.

Supriono, (2003) dalam penelitiannya mengenai peran asimetri informasi dan peresponan keinginan sosial sebagai variabel moderating hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajer di Indonesia, secara simultan asimetri informasi dan peresponan keinginan sosial memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dan kinerja manajerial, sedangkan secara parsial hanya asimetri informasi yang memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dengan kinerja manajerial.

Meidiawati (2004) mengenai peranan asimetri informasi, keterlibatan pekerjaan dan kecukupan anggaran terhadap partisipasi penganggaran dan terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajemen, dapat diketahui partisipasi penganggaran mempunyai hubungan secara marginally signifikan terhadap kinerja dan asimetri informasi mempengaruhi secara positif signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja. Sedangkan kecukupan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan kinerja.

Krisler, (2006) mengakomodir kontradiktif penelitian yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, *job relevant information* dan asimetri informasi. Krisler, (2006) menemukan bahwa proses penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi bawahan yang mempunyai informasi berkenaan dengan tugas, tidak mengakibatkan menurunnya asimetri informasi bahwa kekurangan partisipasi

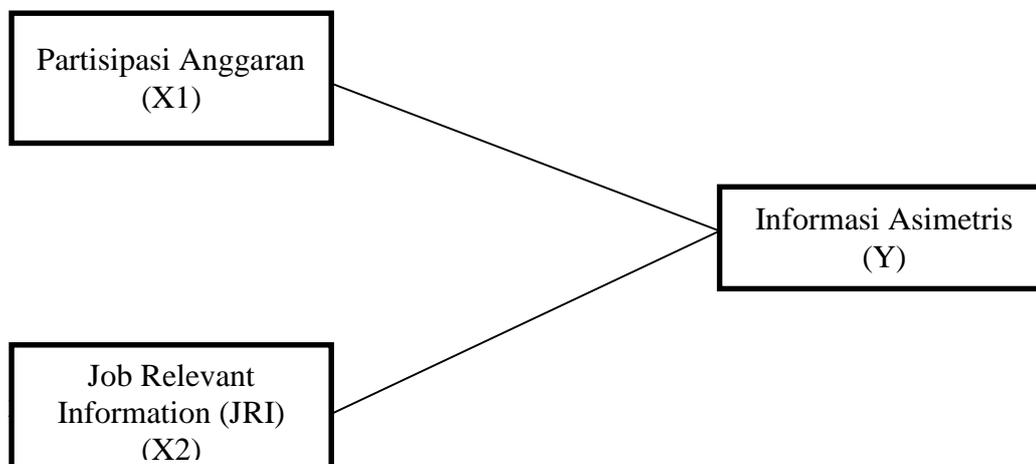
anggaran jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan perilaku menyimpang, baik dari bawahan maupun oleh atasan.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Kren, Leslie. (1992)	Budgetary Participation and Managerial Performance: The Impact of Information and Environmental Volatility	Budgetary Participation (X1); Information (X2); Environmental Volatility (X3); Managerial Performance (Y);	Partisipasi anggaran tidak berhubungan secara langsung dengan kinerja manajerial, akan tetapi melalui JRI. Partisipasi berhubungan positif dengan JRI, dan dengan diperolehnya JRI, kinerja manajerial akan meningkat. Bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut meningkat
2	Supriyono, R. A. & Akhmad Sykhroza. (2003)	Peran Asimetri Informasi dan Peresponan Keinginan Sosial Sebagai Variabel Moderating Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia.	Partisipasi Penganggaran (X1); Asimetri Informasi (X2); Peresponan Keinginan Sosial (X3) Kinerja Manajer (Y)	Secara simultan asimetri informasi dan peresponan keinginan sosial memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dan kinerja manajer, sedangkan secara parsial hanya asimetri informasi yang memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dengan kinerja manajer.
3	Meidiawati, (2004)	Peranan Asimetri Informasi, Keterlibatan Pekerjaan dan Kecukupan Anggaran Terhadap Partisipasi Penganggaran dan Terhadap Hubungan Partisipasi Penganggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Kasus pada PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta)	Asimetri Informasi (X1); Keterlibatan Pekerjaan (X2); Kecukupan Anggaran (X3) Partisipasi Penganggaran (Y1); Kinerja Manajerial (Y2)	(1) Partisipasi penganggaran mempunyai hubungan secara marginally signifikan terhadap kinerja, (2) asimetri informasi, mempengaruhi secara positif signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja. Sedangkan keterlibatan pekerjaan, mempengaruhi secara positif tidak signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja. Kecukupan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan

				partisipasi penganggaran dengan kinerja.
4	Yusfaningru, Kusnasriyanti dan Imam Ghozali. (2005)	Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervening (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia).	Partisipasi Anggaran (X1) Komitmen Tujuan Anggaran (X2); Job Relevant Information (X3). Kinerja Manajerial (Y)	Peneliti menemukan hubungan antara partisipasi dengan JRI dimana dalam proses partisipasi, bawahan/pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga atasan/ pemegang kuasa anggaran akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas.
5	Ompusunggu, Krisler Bornadi, & Bawono, Icku Rangga, (2006)	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) Terhadap Informasi Asimetris (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah)	Partisipasi Anggaran (X1); Job Relevant Information (X2). Informasi Asimetris (Y)	Bahwa proses penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi bawahan/pelaksana anggaran yang mempunyai informasi berkenaan dengan tugas, tidak mengakibatkan menurunnya informasi asimetris Bahwa kekurangan partisipasi anggaran jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan perilaku menyimpang, baik dari bawahan/pelaksana anggaran maupun oleh atasan/pemegang kuasa anggaran. Selain itu, tampak bahwa atasan/pemegang kuasa anggaran belum mampu menggali informasi yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran dalam proses partisipasi.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

2.4.1 Partisipasi Anggaran dan Pengaruhnya Terhadap Informasi Asimetri

Partisipasi anggaran sebagai proses dimana bawahan diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran.

Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan di kalangan bawahan (Chong, 2002 dalam Krisler, 2006).

Jika bawahan yang terlibat dalam partisipasi anggaran mempunyai informasi khusus tentang kondisi lokal, akan memungkinkan bagi mereka untuk melaporkan informasi tersebut kepada atasan atau dengan kata lain, partisipasi anggaran menyebabkan bawahan akan memberikan informasi yang dimilikinya untuk membantu organisasi (Baiman, 1982 dalam Darlis, 2002). Namun Young (1985) dalam Darlis (2002) beranggapan sebaliknya bahwa bawahan lebih memilih tidak melaporkan informasi kepada atasan untuk membantu proses penyusunan

anggaran. Hal ini dapat terjadi misalnya, jika melakukan kebijakan pemberian *rewards* perusahaan kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran, bawahan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah dicapai dan dapat mempertinggi kompensasi yang akan diperoleh bawahan sebagai pelaksana anggaran.

Krisler (2006) juga meneliti pengaruh partisipasi anggaran terhadap informasi asimetris per variabel dan mendapatkan hasil yakni terdapat pengaruh secara signifikan antar variabel tersebut yang dapat diartikan sebagai keterlibatan semu dari para manajer lini tengah dan bawah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisher, Fredericksen dan Peffer (2002).

H1: Partisipasi Anggaran Berpengaruh Negatif Terhadap Informasi Asimetris.

2.4.2 *Job Relevant Information* dan Pengaruhnya Terhadap Informasi

Asimetris

Utomo (2006) menjelaskan bahwa jri membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini yang memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika bawahan merasa dapat memutuskan sendiri tanpa mendiskusikan kepada atasannya, hal-hal seperti inilah dapat menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan dari organisasi. Komunikasi yang tidak lancar antara atasan dan bawahan (JRI rendah) dapat menyebabkan terjadinya informasi

asimetris. Hal ini sejalan dengan penelitian Krisler (2006) namun berbeda dengan hasil penelitian Muliasari (2005) dimana bawahan yang mempunyai JRI yang semakin rendah cenderung untuk semakin terbuka dan menyampaikan informasi yang diketahuinya guna menunjang proyek anggaran untuk unit tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Job Relevant Information* Berpengaruh Negatif Terhadap Informasi

Asimetris.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan sampel yang digunakan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerja Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Pekarbunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Tata Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas Komunikasi Dan Informatika.

3.2 Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan merupakan data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebar pada sampel yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan adalah metode distribusi langsung (*direct distribution method*) yaitu, mendatangi responden secara langsung untuk menyerahkan atau mengambil kembali kuesioner. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah

kepala bagian, kepala sub dinas, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala bidang, kepala sub bidang dan staf penganggaran yang terlibat atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.3 Variabel Operasional

Data yang diteliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, variabel bebas (*Independent variabel*) dan variabel terikat (*Dependent variabel*). Variabel bebas pada penelitian ini Adalah Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Informasi Asimetris.

Variabel independen pertama (X1) dari penelitian ini adalah partisipasi anggaran, yaitu tingkat partisipasi atasan atau pemegang kuasa anggaran dengan bawahan atau pelaksana anggaran dalam proses penyusunan anggaran. Dalam mengukur variabel ini digunakan kuisioner yang dikembangkan oleh Milani (1975).

Pengukuran variabel ini menggunakan 6 (enam) item pertanyaan dengan skala Likert satu sampai dengan lima. Skor yang semakin tinggi menunjukkan partisipasi anggaran di organisasi tersebut sangat besar, sedangkan skor rendah berarti partisipasi anggaran di organisasi tersebut kecil.

Variabel independen kedua (X2) dari penelitian ini adalah *job relevant information* (JRI), dalam penelitian ini JRI dikriteriakan sebagai seberapa banyak para atasan maupun bawahan memiliki informasi yang sesuai dan berkaitan

dengan tugas yang dilakukan dan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Kren (1992) dalam Krisler (2006). Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) item pertanyaan dengan skala likert satu sampai dengan lima. Skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa JRI yang dimiliki pada organisasi tersebut sangat besar, sedangkan skor rendah berarti JRI di organisasi tersebut kecil.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah informasi asimetris, yaitu keadaan dimana bawahan memiliki informasi yang lebih akurat mengenai unit tanggungjawabnya daripada atasan. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Krisler (2006). Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) item pertanyaan dengan skala likert satu sampai dengan lima. Skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa informasi asimetris yang dimiliki pada organisasi tersebut sangat besar, sedangkan skor rendah berarti terjadinya informasi asimetris di organisasi tersebut kecil.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2005).

Secara umum, terdapat empat jenis ukuran, yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio. Pada penelitian ini, variabel sebagai konsep yang mempunyai nilai dengan

jenis pengukuran yang dipakai adalah jenis ukuran interval. Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information* Terhadap Informasi Asimetris

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Variabel bebas, yaitu Partisipasi Anggaran (X1)	Partisipasi anggaran adalah keterlibatan antara atasan dengan bawah untuk dapat terlibat dan memberikan pengaruh dalam anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan ketika anggaran sedang disusun • Alasan atasan membuat revisi anggaran • Frekuensi meminta pendapat dan usulan tentang anggaran kepada atasan • Pengaruh yang dirasakan atas anggaran final • Pandangan atasan/tim atas kontribusinya terhadap anggaran • Frekuensi atas meminta pendapat usulan ketika anggaran disusun (Krisler, 2006)
2	Variabel bebas, yaitu <i>job relevant information</i> (X2)	Suatu informasi yang memfasilitasi pembuat keputusan yang berhubungan dengan tugas. (Handayani, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat informasi yang jelas • Mempunyai informasi yang memadai • Memperoleh informasi yang strategi • Mencari informasi yang tepat (Krisler, 2006)
3	Variabel terikat, yaitu informasi asimetris (Y)	Suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasannya, termasuk informasi lokal maupun informasi pribadi. (Fitri, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan • Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal • Kinerja potensial • Teknis pekerjaan • Mampu menilai dampak potensial • Pencapaian bidang kegiatan (Krisler, 2006)

3.5 Pengujian Validitas dan Realibilitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji validitas dan realibilitasnya oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, uji validitas dan realibilitas tetap dilakukan karena mempertimbangkan perbedaan waktu dan kondisi yang dialami oleh penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya.

Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran. Untuk mengetahui validitas dari item-item pertanyaan pada masing-masing variabel dilakukan dengan menghitung korelasi *product moment pearson* antara skor satu item dengan skor total. Uji realibilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha*. Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kekonsistenan alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Hasil pengukuran terhadap variabel tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dapat ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally, 1967) dalam (Ghozali, 2005).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan alat uji signifikansi regresi secara sendiri-per variabel (uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Informasi Asimetris

X1 = Partisipasi Anggaran

X2 = *Job Relevant Information* (JRI)

= Konstanta

1- 2 = Koefesien Regresi

e = Error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model)

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis statistik dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat kesalahan sebesar () 5%. Hasil pengujian ini akan menunjukkan diterima atau ditolaknya Ha apabila :

p-Value < 0,05 maka Ha didukung

p-Value > 0,05 maka Ha tidak didukung

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan yaitu: Hipotesis pertama (H_1) didukung yang berarti bahwa semakin baik partisipasi anggaran yang memberikan kesempatan antara bawahan dan atasan untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan selama periode tertentu dapat memberikan dampak berkurangnya suatu informasi asimetris sedangkan Hipotesis kedua (H_2) tidak didukung yang berarti bahwa *job relevant information* tidak memiliki pengaruh terhadap berkurangnya informasi asimetris. Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman mengenai tugas belum baik yang tidak mengakibatkan menurunnya informasi asimetris.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian seperti:

1. Tidak semua SKPD yang ada didatangi oleh peneliti bersedia menjadi responden penelitian, sehingga jumlah responden relatif sedikit.
2. Pada saat peneliti menyebarkan kuesioner tidak semua SKPD bersedia untuk melakukan wawancara langsung terhadap responden.

3. Hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep anggaran sebagian besar masih dilakukan dalam organisasi sektor swasta, sehingga penulis kesulitan dalam mencari jurnal-jurnal penelitian dan literatur-literatur yang khusus membahas konsep tersebut dalam organisasi sektor pemerintahan.
4. Penelitian ini hanya melibatkan 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih tercakup dalam lingkup dinas saja.
5. Penelitian ini melibatkan tiga variabel sehingga masih banyaknya variabel lain yang memiliki pengaruh yang belum diteliti.
6. Lama bekerja di bidang yang sama tidak teridentifikasi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini dinas maupun badan yang terdapat di daerah lain agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas sampel penelitian sehingga dapat memberikan gambaran dan hasil yang lebih baik, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat selalu mendampingi responden dalam hal pengisian kuesioner sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan maksud dari setiap item pertanyaan yang ada dan diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga tingkat pengaruhnya akan lebih besar dan juga item setiap pertanyaan dalam kuesioner agar lebih diperbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. Dan Govindarajan. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 1, Buku 2. Penerbit Salemba Empat; Jakarta.
- Edfan, Darlis. 2002. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5, No 85-101.
- Hafridebri. 2013. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan *job relevant information* sebagai *variabel intervening*. *Skripsi*, Universitas Negeri Padang. Padang.
- Handayani, Yulia. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Asimetri Informasi Dengan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Rumah Sakit Umum Yang Sudah BLU di Sumatra Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang; Padang*.
- Husin, R. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pimpinan dengan Desentralisasi, Budget Goal Commitment dan Job-Relevant Information Sebagai Variabel Moderating. *Tesis S2*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi; Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi; Yogyakarta.
- Mulyasari, Windu dan Slamet Sugiri. 2005. Keadilan, Komitmen Pada Tujuan dan Job Relevant Information Dalam Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*; Yogyakarta.
- Ompusunggu, Krisler Bonardi. 2006. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Informasi Asimetris Pada Badan Layanan Umum Universitas Jendral Soedirman. *Simposium Nasional Akuntansi IX*; Padang.
- Sinurat, Mangasi. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information (JRI) dan Komunikasi Sebagai Variabel Moderating Pada PDAM Di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatra Utara; Medan*.
- Siregar, Vebiyana. 2003. Hubungan Partisipasi Anggaran dengan Informasi Job Relevant Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajerial di Lingkungan Pemerintah Yogyakarta. *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta; 2003.

- Sumarno, J. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Simposium Nasional Akuntansi VII*; Solo.
- Utomo, Sigit Budhi. 2006. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris dan Budget Emphasis terhadap Senjangan Anggaran. *Skripsi*, FE UNSOED Purwokerto.
- Warindrani. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu; Yogyakarta.
- Yulia, Fitri. 2004. Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran pada Universitas Swasta di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Ichsan Gorontalo*. Vol 2, No 3. Universitas Syiah Kuala.
- Yusfaningrum, Kusnasriyanti dan Iman Ghozali. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia): *Simposium Nasional Akuntansi VIII IAI KAPd*, September 2005.